



LAPORAN KINERJA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

2020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pusdiklat Setjen DPR RI) Tahun 2020 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Pusdiklat Setjen DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 serta umpan balik perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. Selain itu juga, laporan kinerja ini merupakan media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pusdiklat Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2020 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sebagai perwujudan dari Akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Gambaran pengukuran capaian kinerja Pusdiklat Setjen DPR RI Tahun 2020 digambarkan dalam tabel berikut ini:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Persentase lulusan diklat dengan nilai minimal memuaskan	95%	95,81%	100,85%
		2. Persentase persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat dengan penilaian minimal memuaskan	90%	100%	111,11%





No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		3. Persentase penyerapan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan	90%	95,09%	100,09%

Hasil capaian kinerja dari sasaran yang di tetapkan telah memenuhi target dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan, namun untuk perbaikan kinerja ke depan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Menetapkan perencanaan kinerja yang berorientasi pada outcome;
2. Mengutamakan penggunaan metode pelatihan nonklasikal dibanding dengan metode pelatihan klasikal;
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai khususnya adalah Laboratorium Komputer;
4. Penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja untuk lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.



KATA PENGANTAR

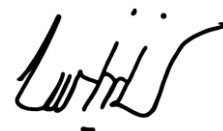


Laporan Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas penggunaan anggaran yang telah dikelola. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan segala dinamika yang ada termasuk pandemi COVID-19, Pusdiklat Setjen DPR RI beserta seluruh jajaran di dalamnya senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan profesional DPR RI. Pencapaian kinerja Pusdiklat Setjen DPR RI Tahun 2020 sebagaimana digambarkan dalam Laporan Kinerja ini.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pusdiklat Setjen DPR RI sebagai Pengembang Kompetensi SDM serta sebagai media evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa datang. Atas peran serta seluruh jajaran pegawai Setjen dan BK DPR RI yang berkomitmen dan berdedikasi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta jabatannya, kami ucapkan terima

Jakarta, Februari 2021
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan



Dr. Dewi Barliana S., M.Psi., QIA
NIP. 196209261988032001





DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. GAMBARAN UMUM	1
1.1.1. DASAR HUKUM.....	2
1.1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4
BAB II.....	10
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III.....	17
AKUNTABILITAS KINERJA	17
3. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1. PERSENTASE LULUSAN DIKLAT DENGAN NILAI MINIMAL MEMUASKAN	18
3.2. PERSENTASE PERSEPSI PESERTA DIKLAT TERHADAP PENYELENGGARAAN DIKLAT DENGAN PENILAIAN MINIMAL MEMUASKAN	24
3.3. PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	28
3.1.1 Perumusan bahan kebijakan Pusediklat;.....	30
3.1.2 Bidang Perencanaan Diklat;.....	30
3.1.3 Bidang Pelaksanaan Diklat;.....	33
3.1.4 Bidang Evaluasi Diklat;.....	36
BAB IV	37
PENUTUP	37
4.1. Kesimpulan	37
4.2. Rekomendasi.....	37





BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI (Pusdiklat Setjen DPR RI) adalah unit kerja baru yang dibentuk pada akhir Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Pusdiklat dibentuk sebagai pengembangan dari Bagian Pendidikan dan Pelatihan yang dalam struktur organisasi Setjen DPR RI semula adalah unit kerja setingkat Eselon III dan berada di bawah Biro Kepegawaian dan Administrasi Anggota DPR RI.

Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, Pusdiklat Setjen DPR RI (Pusdiklat) bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Setjen dan BK DPR RI sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016, yaitu Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Berkenaan dengan tugas tersebut, pengembangan kompetensi PNS Setjen DPR RI yang berjumlah 1.274 orang diselenggarakan oleh Pusdiklat Setjen DPR RI mengacu pada Pasal 203 ayat (4) UU ASN, yang menyebutkan bahwa setiap PNS mempunyai hak untuk mengembangkan kompetensinya. Hak pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan melalui diklat dan kegiatan pengembangan lainnya. Hal ini menjadi strategi organisasi agar PNS di



lingkungan Setjen DPR RI dapat lebih optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan peranannya dalam memberikan dukungan kepada Dewan.

Sebagai lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan kepada Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, Setjen DPR RI diharapkan dapat memperkuat kompetensi PNS di bidang legislasi. Dalam hal ini terdapat PNS calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum dapat diangkat dalam jabatannya karena belum dapat mengikuti Diklat Fungsional bagi Calon Pejabat Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Selama ini Pusdiklat hanya dapat mengikutsertakan Calon Pejabat Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undang di Kementerian Hukum dan HAM yang kuotanya sangat terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pusdiklat Setjen DPR RI telah mendapatkan akreditasi untuk menyelenggarakan Diklat Fungsional calon Pejabat Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan kepada Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga pembina bagi jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Proses akreditasi yang dimulai sejak tahun 2017 telah berjalan dengan baik, dan penyerahan sertifikasi telah dilaksanakan pada awal tahun 2019. Di tahun 2020 ini Pusdiklat telah melaksanakan Diklat tersebut yang diselenggarakan selama bulan September-Desember 2020 dengan total 22 peserta yang terdiri dari 3 instansi, yaitu 11 orang dari Sekretariat Jenderal DPR RI, 6 orang dari Kementerian Sekretariat Negara, dan 5 orang dari Kementerian Pertanian yang dilakukan secara virtual.

1.1.1. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;





- 3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara
- 5) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- 6) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
- 7) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- 8) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I;
- 9) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
- 10) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
- 11) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman



Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;

12) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

1.1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, menyebutkan bahwa “Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dibentuk Pusat sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal”. Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut, dibentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016.

Sesuai Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015 dimaksud, Pusdiklat mempunyai:

Tugas: melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI”.

Fungsi:

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
3. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
4. Pengoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
5. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan;
6. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan;





7. Perencanaan pendidikan dan pelatihan;
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
9. Pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
10. Pelaksanaan tata usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
11. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal;

Pasal 266 Peraturan Sekjen tersebut mengatur bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:

1. Bidang Perencanaan Diklat;
2. Bidang Pelaksanaan Diklat;
3. Bidang Evaluasi Diklat;
4. Subbagian Tata Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing bidang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan

Tugas: melakukan perencanaan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan Diklat;
2. Penyusunan bahan kegiatan di bidang perencanaan pendidikan dan pelatihan;
3. Pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pendidikan dan pelatihan;
4. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
5. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
6. Pengkajian dan pengembangan kurikulum;
7. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh kepala pusat pendidikan dan pelatihan; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.



2. Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bidang pelaksanaan diklat;
2. Penyusunan bahan kegiatan di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
3. Pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan uji kompetensi;
6. Evaluasi pencapaian kinerja Bidang Pelaksanaan Diklat;
7. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh kepala pusat pendidikan dan pelatihan; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala pusat pendidikan dan Pelatihan.

3. Bidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan

Tugas: melaksanakan evaluasi pendidikan dan pelatihan.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bidang evaluasi diklat;
2. Penyusunan bahan kegiatan di bidang evaluasi pendidikan dan pelatihan;
3. Pelaksanaan kegiatan di bidang evaluasi pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
6. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;



7. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh kepala pusat pendidikan dan pelatihan; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala pusat pendidikan dan Pelatihan.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas: menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan, bidang, dan kelompok jabatan fungsional.

Organisasi Pusdiklat Sekretariat Jenderal sebagaimana terlihat dalam Bagan 1.1

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Pusdiklat Sekretariat Jenderal DPR RI



Sumber: Bagian Ortable Setjen DPR RI, 2020

Dalam Struktur Sekretariat Jenderal DPR RI, Pusdiklat berada langsung di bawah Sekretariat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.



a. Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi Pusdiklat memiliki komposisi pegawai sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020

NO	STRUKTURAL/FUNGSIONAL	FORMASI (orang)	JUMLAH YANG ADA TAHUN 2020	
			SAAT INI (orang)	POSISI DI UNIT KERJA
1.	Kepala Pusat	1	-	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
2.	Kepala Bidang	3	3	Kepala Bidang Perencanaan Diklat Kepala Bidang Pelaksanaan Diklat Kepala Bidang Evaluasi Diklat
3	Kepala Sub Bagian	1	1	Kepala Sub Bagian TU Pusdiklat
4	Widyaiswara Ahli Madya	2	0	Kapusdiklat
5	Widyaiswara Ahli Muda	2	2	Bidang Perencanaan Diklat
		5	0	Bidang Pelaksanaan Diklat
		2	0	Bidang Evaluasi Diklat
6	Widyaiswara Ahli Pertama	2	2	Bidang Perencanaan Diklat
		5	2	Bidang Pelaksanaan Diklat
		2	1	Bidang Evaluasi Diklat
7	Penyusun Bahan Kebijakan	2	2	Sub Bagian TU Pusdiklat
8	Analisis Diklat	4	3	Bidang Perencanaan Diklat
		2	3	Bidang Pelaksanaan Diklat
		3	3	Bidang Evaluasi Diklat
9	Pengelola Data	4	4	Sub Bagian TU Pusdiklat
10	Pengadministrasi Umum	7	3	Sub Bagian TU Pusdiklat
Jumlah		42 orang	29 orang	

Sumber: Pusdiklat Setjen DPR RI, 2020.



Adapun komposisi pegawai Pusdiklat berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.

Komposisi Pegawai Pusdiklat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Serta Pangkat dan Golongan Tahun 2020

	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	PANGKAT/GOL
1	S3	1	III/d
2	S2	1	IV/b
		2	IV/a
		1	III/d
3	S1	3	III/b
		6	III/d
		1	III/c
4	DIII	7	III/a
		1	III/c
		1	II/c
5	SLTA	4	III/b
		1	III/a
	JUMLAH	29	



Sumber: Bagian Kepegawaian Setjen DPR RI, 2020.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan aparatur pemerintah yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat di bidang persidangan, administrasi dan keahlian. Sesuai dengan kedudukannya, apa yang akan dicapai oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam lima tahun ke depan harus selaras dengan visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2020-2024 yakni:

“Menjadi Lembaga Perwakilan yang Modern, Terbuka, Aspiratif, dan Berintegritas Sebagai Pilar Demokrasi Untuk Mewujudkan Tujuan Bernegara”.

Untuk mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut, maka Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merumuskan visi sebagai berikut:

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadikan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat



Republik Indonesia berkinerja tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta mewujudkan lingkungan kerja yang good and clean governance sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi yang memuat upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Misi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

1

Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2

Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

3

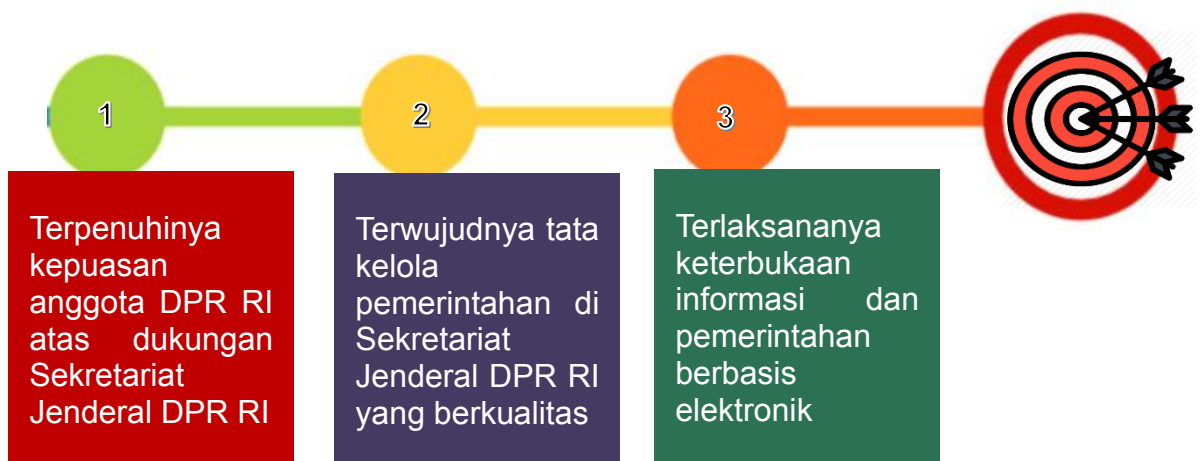
Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:



Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka disusunlah sasaran program Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakni:



Pusat Pendidikan dan Pelatihan merupakan unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki peran dan fungsi sebagai pembentuk sumber daya manusia Sekretariat Jenderal DPR RI yang unggul dan kompeten dalam memberikan dukungan teknis, persidangan, dan keahlian. Oleh karena itu, Pusdiklat Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki peran strategis dalam mewujudkan sasaran program Sekretariat Jenderal



DPR RI untuk terwujudnya tata kelola kelembagaan yang professional, baik dan bersih.

Indikator kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan dalam Sasaran Program Sekretariat Jenderal DPR RI untuk terwujudnya tata kelola kelembagaan yang professional, baik dan bersih tahun 2020 adalah jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal “B” dengan target 2 (dua) program. Indikator program tersebut merupakan perubahan dari indikator kinerja sebelumnya yakni “hasil penilaian akreditasi program Pusklat” dengan target 2 (dua) program. Adapun perubahan tersebut, adalah untuk lebih memperjelas target pencapaian sasaran program, yakni tidak hanya menyebutkan jumlah program pelatihan yang terakreditasi, tetapi juga dengan menyebutkan level akreditasi yang harus dicapai.

Sasaran kegiatan Pusklat Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 adalah meningkatnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Adapun indikator kinerja dari sasaran kegiatan tersebut juga mengalami perubahan sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI	1. Persentase Perencanaan Program Pengembangan Kompetensi, Kurikulum, dan Modul sesuai standar kompetensi.	90% 95% 90%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Persentase lulusan diklat dengan nilai minimal memuaskan 3. Persentase persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat dengan penilaian minimal Baik 4. Jumlah dokumen administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan	4 Dokumen

Kegiatan	Anggaran
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 8.427.454.000,-

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Persentase lulusan diklat dengan nilai minimal memuaskan 2. Persentase persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	95% 90%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		dengan penilaian minimal memuaskan 3. Persentase penyerapan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan	90%

Kegiatan	Anggaran
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 8.427.454.000,-

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Pusdiklat Sekretariat Jenderal DPR RI mengalami perubahan dari 4 (empat) indikator kinerja menjadi 3 (tiga) indikator kinerja. Dalam indikator kinerja sebelumnya tercantum persentase perencanaan program pengembangan kompetensi, kurikulum dan modul sesuai standari kompetensi, namun dalam perjanjian kinerja yang baru indikator kinerja tersebut dihilangkan. Hal ini disebabkan indikator kinerja tersebut dianggap telah terakomodir dalam indikator kinerja lainnya yakni, persentase persepsi diklat terhadap penyelenggaraan Diklat dengan penilaian minimal memuaskan. Selain itu, indikator kinerja terkait dengan jumlah dokumen administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 4 dokumen juga dihilangkan. Hal ini dikarenakan jumlah dokumen administrasi merupakan *output*, sementara dalam indikator kinerja Pusdiklat Setjen DPR RI tahun 2020 lebih ditekankan pada *outcome*. Pencapaian *outcome* ini penting sebagai pencapaian tujuan jangka panjang yang menekankan pada perubahan tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang lebih berkualitas





Sementara itu, indikator kinerja persentase penyerapan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebesar 90% yang tidak tercantum pada perjanjian kinerja sebelumnya, dimunculkan dan menjadi salah satu indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan tahun 2020. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Pendidikan dan Pelatihan dalam penyerapan anggaran, sehingga setiap unit kerja di lingkungan Pusdiklat memiliki komitmen dan tanggungjawab penuh terhadap pencapaian penyerapan anggaran.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan mekanisme membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja serta menghitung capaian indikator kinerja dengan rumus angka capaian realisasi dibagi dengan angka target yang direncanakan, kemudian dikali 100%. Gambaran pengukuran capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun
2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Persentase lulusan diklat dengan nilai minimal memuaskan	95%	95,81%	100,85%
		2.	Persentase persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat dengan penilaian minimal memuaskan	90%	100%	111,11%
		3.	Persentase penyerapan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan	90%	95,09%	100,09%





Penjelasan atas capaian kinerja organisasi untuk setiap kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1. PERSENTASE LULUSAN DIKLAT DENGAN NILAI MINIMAL MEMUASKAN

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berkenaan dengan tugas tersebut, pengembangan kompetensi PNS Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berjumlah 1.344 orang diselenggarakan oleh Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI mengacu pada Pasal 203 ayat (4) UU ASN, yang menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak untuk mengembangkan kompetensinya. Hak pengembangan kompetensi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan melalui diklat dan kegiatan pengembangan lainnya. Hal ini menjadi strategi organisasi agar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat lebih optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan peranannya dalam memberikan dukungan kepada Dewan melaksanakan penyelenggaraan pelatihan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Tahun 2020 telah melaksanakan berbagai kegiatan melalui Pelatihan Manajerial, Fungsional, Teknis dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop yang



dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta yang dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga Pelatihan lainnya. Rincian dari kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, dan 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.2
Pelatihan Manajerial

No.	Nama Pelatihan	Mulai	Selesai	Jumlah Peserta	Ket.
1	PKN Tingkat I LAN	29-04-2020	10-09-2020	1	KIRIM
2	PKN Tingkat II LAN A.I	13-02-2020	12-06-2020	1	KIRIM
3	PKN Tingkat II LAN A.VII	17-03-2020	17-07-2020	2	KIRIM
4	PKN Tingkat II LAN A.X	24-06-2020	14-10-2020	2	KIRIM
5	PKA LAN A.I	22-04-2020	13-08-2020	2	KIRIM
6	PKA BPSDM Kemendagri	24-08-2020	03-12-2020	11	KIRIM
7	PKP Setjen DPR RI	01-09-2020	18-12-2020	20	SWA

Tabel 3.3
Pelatihan Fungsional

No.	Nama Pelatihan	Mulai	Selesai	Jumlah Peserta	Ket.
1	Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang PUU	28-09-2020	17-12-2020	22	SWA
2	Diklat Penjenjangan Auditor Muda	03-03-2020	17-06-2020	3	KIRIM
3	Diklat Pembentukan Auditor Ahli	16-06-2020	24-07-2020	1	KIRIM
4	Diklat Pembentukan Auditor Ahli	07-07-2020	14-08-2020	3	KIRIM
5	Diklat Pembentukan Auditor Terampil	07-07-2020	05-08-2020	5	KIRIM



Tabel 3.4
Pelatihan Teknis

No.	Nama Pelatihan	Mulai	Selesai	Jumlah Peserta	Ket.
1	Pelatihan Pengembangan Kapasitas Fasilitator	02-03-2020	06-03-2020	20	SWA
2	Pelatihan Tata Naskah Dinas	25-02-2020	28-02-2020	23	SWA
3	Pelatihan Presentasi dengan Infografis A.3	24-02-2020	28-02-2020	17	SWA
4	Pelatihan Microsoft Office Tingkat Lanjutan	03-02-2020	07-02-2020	14	SWA
5	Pelatihan Transformational Leadership Pimpinan Tinggi	13-03-2020	15-03-2020	18	KONTRAK
6	Pelatihan Manajemen Persidangan berbasis Blended Learning	03-08-2020	07-08-2020	41	SWA
7	Pelatihan Pengembangan Kapasitas Agen Perubahan	24-08-2020	26-08-2020	26	KONTRAK
8	Pelatihan Perikanan Berbasis Blended Learning	02-11-2020	06-11-2020	37	SWA
9	Pelatihan Presentasi dengan Infografis Berbasis Blended Learning A.4	11-05-2020	15-05-2020	16	SWA
10	Pelatihan Presentasi dengan Infografis Berbasis Blended Learning A.5	13-07-2020	17-07-2020	11	SWA
11	Pembekalan Materi serta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	12-10-2020	23-10-2020	34	SWA
12	Pelatihan Statistika Berbasis Blended Learning	16-11-2020	20-11-2020	9	SWA
13	Pelatihan Perekaman	02-11-2020	06-11-2020	36	SWA
14	Pelatihan Public Speaking	23-11-2020	26-11-2020	20	KONTRAK

Tabel 3.5
Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No.	Nama Pelatihan	Mulai	Selesai	Jumlah Peserta	Ket.
1	Workshop Pengelolaan Media Sosial DPR	11-02-2020	11-02-2020	13	SWA
2	Pelatihan PjPHP	06-04-2020	10-04-2020	20	SWA
3	Workshop Keprotokolan	08-06-2020	09-06-2020	100	SWA
4	Workshop Pembelajaran e-Learning	07-07-2020	09-07-2020	60	SWA



No.	Nama Pelatihan	Mulai	Selesai	Jumlah Peserta	Ket.
5	Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai	20-07-2020	24-07-2020	150	SWA
6	Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024	22-07-2020	24-07-2020	155	SWA
7	Sosialisasi Pengisian Aplikasi Administrator Pengaduan Masyarakat	29-07-2020	29-07-2020	35	SWA
8	Workshop Penanganan Kondisi Darurat di Komplek Gedung DPR RI	06-08-2020	06-08-2020	48	SWA
9	Workshop Pengelola dan Penyelenggara PKP PKA	10-08-2020	14-08-2020	17	SWA
10	Pelatihan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Anggaran	13-11-2020	14-11-2020	164	SWA

Tabel 3.6
Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop yang dilaksanakan
Lembaga/Instansi lain (Kirim)

No.	Nama Pelatihan	Mulai	Selesai	Jumlah Peserta	Ket.
1	Pelatihan Peningkatan Kemampuan ADC dan Pamwal	05-01-2020	08-01-2020	2	KIRIM
2	Procurement Fraud: Teknik dan Strategi Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan dalam Pengadaan	12-02-2020	13-02-2020	5	KIRIM
3	Preparation dan LAN ECSCS Test	24-02-2020	28-02-2020	21	KIRIM
4	Pelatihan NexCloud Data Migration	11-02-2020	14-02-2020	8	KIRIM
5	Pelatihan Plan and Organizer Training	19-02-2020	21-02-2020	4	KIRIM
6	Pelatihan Mendesain Kurikulum Silabus Diklat	19-02-2020	21-02-2020	4	KIRIM
7	Diklat Dasar-Dasar Kearsipan	24-02-2020	28-02-2020	2	KIRIM
8	Diklat Penyusutan Arsip	01-03-2020	06-03-2020	2	KIRIM
9	Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	30-06-2020	03-07-2020	3	KIRIM
10	Training ESQ 165 New Chapter (Online)	18-07-2020	19-07-2020	2	KIRIM
11	Training Access Point Controller Migration	21-10-2020	23-10-2020	6	KIRIM
12	Pelatihan Pengelolaan Kelas	26-10-2020	28-10-2020	8	KIRIM



Pencapaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan persentase lulusan diklat dengan nilai minimal memuaskan telah dapat melampaui capaian kinerja dari target 95 % dan terealisasi dengan skor akhir hasil penilaian sebesar 95,81 %, dengan demikian capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2020 sebesar 100,58 %.

Pengukuran terhadap persentase lulusan diklat dengan nilai minimal memuaskan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dilakukan secara selektif berdasarkan kurikulum pelatihan yang mana didalamnya mensyaratkan kualifikasi lulusan untuk menguji kompetensi teknis. Berikut rincian kualifikasi lulusan yang digunakan dalam penilaian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan:

- a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100);
- b. memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
- c. baik (skor 70,01 – 80,0);
- d. cukup (skor 60,01 – 70,00).

Berdasarkan kualifikasi lulusan sebagaimana tersebut diatas, berikut rincian Pendidikan dan Pelatihan yang mensyaratkan kualifikasi lulusan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Tahun 2020:



No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Penilaian		
			Sangat Memuaskan	Memuaskan	Baik
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I LAN	1	-	1	-
2.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II LAN	1	-	1	-
3.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator LAN A.I	2	1	1	-
4.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kemendagri A.II	11	-	11	-
5.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	20	1	19	-
6.	Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang PUU	22	-	19	3
7.	Pelatihan Presentasi dengan Infografis A.3	17	6	11	-
8.	Pelatihan Presentasi dengan Infografis A.4 Berbasis <i>Blended Learning</i>	16	-	16	-
9.	Pelatihan Presentasi dengan Infografis A.5 Berbasis <i>Blended Learning</i>	10	8	2	-
10.	Pelatihan Office Lanjutan	14	2	9	3
11.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator	20	1	19	-
12.	Pelatihan Statistika Berbasis <i>Blended Learning</i>	9	1	8	-
Total		143	20	117	6
Persentase		100%	13,99	81, 82	4,19
Target		100%	95,81		4,19



3.2. PERSENTASE PERSEPSI PESERTA DIKLAT TERHADAP PENYELENGGARAAN DIKLAT DENGAN PENILAIAN MINIMAL MEMUASKAN

Berdasarkan penetapan kinerja Kapusdiklat dengan Sekjen DPR RI, ditetapkan bahwa: “Persentase persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat dengan penilaian minimal Baik dengan target 90%”.

Untuk mendukung *outcome* Pusdiklat diatas, Bidang Evaluasi Diklat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan sebagai pendukung kinerja Pusdiklat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Monitoring dan Evaluasi Pelatihan

NO	PELATIHAN
1.	Evaluasi Pelatihan Tata Naskah Dinas Tahun 2020
2	Evaluasi Pelatihan Presentasi dengan Infografis A.3 Tahun 2020
3.	Evaluasi Pelatihan Pengembangan Kapasitas Fasilitator Tahun 2020
4.	Evaluasi Pelatihan Microsoft Office Tingkat Lanjutan Tahun 2020
5.	Evaluasi Pelatihan Presentasi dengan Infografis Berbasis <i>Blended Learning</i> A.4 Tahun 2020
6.	Evaluasi Pelatihan Manajemen Persidangan berbasis <i>Blended Learning</i> Tahun 2020



NO	PELATIHAN
7.	Evaluasi Pelatihan Pengembangan Kapasitas Agen Perubahan
8.	Evaluasi Pelatihan Statistika
9.	Evaluasi Pelatihan Pelatihan Public Speaking
10.	Evaluasi <i>Workshop</i> Pembelajaran <i>e-Learning</i>
11.	Evaluasi Pelatihan Presentasi dengan Infografis Berbasis <i>Blended Learning</i> A.5
12.	Evaluasi Pelatihan Perekaman
13.	Evaluasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
14.	Evaluasi Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan *monitoring* dan evaluasi pelatihan yang dilakukan Bidang Evaluasi Diklat terhadap penyelenggaraan pelatihan selama Tahun 2020, didapatkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.8
Hasil Tabulasi Data Penilaian Peserta Diklat terhadap
Penyelenggaraan

NO	PELATIHAN	ASPEK PENILAIAN				
		PENGAMPU MATERI	PENYELENG- GARAAN	MATERI ATAU KURIKULUM	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL DAN PREDIKAT
1	Evaluasi Pelatihan Tata Naskah Dinas	87,05	87,05	86,94	86,90	86,99 / Memuaskan
2	Evaluasi Pelatihan Presentasi dengan Infografis	83,98	81,05	81,55	74,16	83,98 / Memuaskan
3	Evaluasi Pelatihan Pengembangan Kapasitas Fasilitator	85,89	86,18	85,81	85,46	85,83 / Memuaskan
4	Evaluasi Pelatihan Microsoft Office Tingkat Lanjutan Tahun 2020	86,80	83,48	84,67	79,98	83,73 / Memuaskan
5	Evaluasi Pelatihan Presentasi dengan Infografis Berbasis <i>Blended Learning A.4</i>	85,50	86,59	86,50	84,66	86,50 / Memuaskan
6	Evaluasi Pelatihan Manajemen Persidangan berbasis Blended Learning Tahun 2020	86,79	86,83	85,37	85,63	86,15 / Memuaskan
7	Evaluasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	93,08	92,13			92,92/ Sangat Memuaskan
8	Evaluasi Pelatihan Pengembangan Kapasitas Agen Perubahan	86,51	85	84,61	83,61	85,15 / Memuaskan
9	Evaluasi Pelatihan Statistika	94,34	94,86	92,93	94,29	94,23 / Sangat Memuaskan
10	Evaluasi Pelatihan Pelatihan Public Speaking	89,1	88,33	87,80	86,60	88,18 / Memuaskan



11	Evaluasi Workshop Pembelajaran e-Learning	86,43	86,11	84,61	83,49	85.41 / Memuaskan
12	Evaluasi Pelatihan Pelatihan Presentasi dengan Infografis Berbasis Blended Learning A.5	87,09	86,80	85,80	85,41	86,44/ Memuaskan
13	Evaluasi Pelatihan Perekaman	86,55	86,74	86,66	85,94	85,51 / Memuaskan
14	Evaluasi Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan	89,25	88,39	-	-	88,82 / Memuaskan

Hasil analisis:

Evaluasi diklat yang dilaksanakan untuk mendapatkan penilaian peserta terhadap penyelenggaraan diklat mempunyai standar penilaian yang menentukan tingkat reaksi/persepsi peserta terhadap penyelenggaraan diklat. Standar penilaian yang digunakan dalam proses evaluasi diklat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.9
Standar Penilaian Evaluasi Diklat

NO	NILAI	PREDIKAT
1.	91 s.d. 100	Sangat Memuaskan
2.	81 s.d. 90	Memuaskan
3.	71 s.d. 80	Cukup
4.	61 s.d. 70	Kurang Memuaskan
5.	kurang dari 60	Tidak Memuaskan

Sumber: Bidang Evaluasi Diklat



Dari Tabel Hasil Tabulasi Data Penilaian Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan dan Tabel Standar Penilaian Evaluasi Diklat di atas terlihat bahwa persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat, 12 (dua belas) pelatihan mendapatkan predikat Memuaskan dan 2 (dua) pelatihan mendapatkan predikat Sangat Memuaskan. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja: } \frac{\text{Jumlah Pelatihan dengan Predikat Minimal Memuaskan}}{\text{Jumlah Pelatihan}} \times 100$$

↓

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja: } \frac{(12+2)}{14} \times 100 = 100\%$$

Dapat disimpulkan bahwa persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat dengan penilaian minimal Baik yang semula ditargetkan sebesar 90%, dicapai melebihi target yaitu sebesar 100%.

3.3. PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PAGU Anggaran yang dikelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia per Januari 2020 adalah sebesar Rp. 8.427.454.000. Pada bulan April 2020 terdapat realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 yang menyebabkan DIPA Anggaran turun menjadi Rp. 5.926.162.000. Pada bulan September 2020, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia



mendapatkan tambahan anggaran (BA BUN) yang semula direncanakan untuk pelaksanaan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional PUU sebesar Rp. 1.039.930.000 sehingga DIPA Anggaran per September 2020 sebesar Rp. 6.966.092.000. Namun karena pelaksanaan pelatihan Calon Pejabat Fungsional PUU yang semula direncanakan diselenggarakan secara klasikal (tatap muka) berubah menjadi non-klasikal (secara e-learning) maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan revisi anggaran BA BUN tersebut dengan mengalihkan anggaran tersebut ke Biro Umum sebesar Rp. 249.473.000 sehingga DIPA anggaran yang dikelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan per November 2020 adalah sebesar Rp. 6.716.619.000.

Pencapaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan persentase penyerapan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 90% dimana realisasi anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.386.647.398 atau sebesar 95,09% dari total DIPA yang dikelola sebesar Rp. 6.716.619.000.

TABEL 3.10
Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan Dan Pelatihan
Tahun 2020

NO.	UNIT/BIDANG	PAGU	REALISASI	PRESENTASE
1	Perumusan bahan kebijakan Pusdiklat	495.653.000	441.118.500	89,00%
2	Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	707.135.000	694.106.300	98,16%
3.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	397.780.000	377.774.200	94,97%
4.	Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan	749.910.000	725.365.800	96,75%



Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Pusdiklat

3.1.1 Perumusan bahan kebijakan Pusdiklat;

1. Rapat Koordinasi dan FGD sesuai Tugas dan Fungsi.
2. Honor Narasumber/ Moderator FGD.
3. Monitoring dan evaluasi Pelatihan Pengembangan Kapasitas Fasilitator di Pusdiklat Wisma Griya Sabha Kopo Tanggal 02-06 Maret 2020.
4. Perjalanan Dinas dalam Rangka *Knowledge Sharing* Pasca Latsar ke BPSDM Sumatera Utara Tanggal 16-19 Maret 2020.
5. Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan pengembangan pedoman evaluasi pelatihan di Wisma Griya Sabha Kopo
6. Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan SOP Monitoring dan Evaluasi Pelatihan di Wisma Griya Sabha Kopo
7. Kunjungan ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan BMKG Jakarta dalam rangka mendapatkan masukan/knowledge sharing terkait pengembangan progam pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan dasar CPNS tanggal 10 Februari.
8. Honor Tim Penyusunan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar CPNS Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2020
9. Honor Tim Penetapan Komite Penjamin Mutu Pada Pusdiklat Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2020
10. Kegiatan Berdinas dari Rumah (Work From Home) dan Berdinas dari Kantor (Work From Office) selama masa Pandemi COVID-19

3.1.2 Bidang Perencanaan Diklat;

1. Kegiatan Rapat Koordinasi dan FGD sesuai Tugas dan Fungsi.
2. Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion terkait penyusunan kurikulum dan modul pelatihan teknis dan pelatihan fungsional (Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, Asisten Perisalah Legislatif, dan Analis APBN).





3. Persiapan dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perisalah dan Asisten Perisalah Legislatif
4. FGD membahas peningkatan kualitas Risalah DPR RI melalui pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional Perisalah Setjen DPR RI yang direncanakan mengundang pimpinan BURT DPR RI
5. Pembayaran Honor Tim Penyusunan Kurikulum Diklat Perjenjangan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif Tahun Anggaran 2020.
6. Pembayaran Honor Tim Penyusunan Kurikulum Diklat Penjenjangan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
7. Pembayaran Honor Tim Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif Tahun Anggaran 2020.
8. Pembayaran Honor Tim Penyusunan Modul Etika Berkomunikasi dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.
9. Pembayaran Honor Tim Penyusunan Modul Perekaman dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.
10. Pembayaran Honor Tim Penyusunan Modul Perekaman dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.
11. Pembayaran Honor Tim Penyusunan Modul Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.



12. Pembayaran Honor Tim Penyusunan Modul Perekaman dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.
13. Pembayaran Honor Tim Penyusunan Modul Perekaman dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.
14. Pembayaran Honor Tim Penyusunan Modul Statistika Ekonomi Dasar dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.
15. Pembayaran Honor Tim Teknis Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui Metode Pelatihan Non Klasikal Tahun Anggaran 2020
16. Pembayaran Honor Tim Penyusunan Konten e-learning dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2020
17. Pembayaran Honor Tim Penyusunan Modul:
 - a. Pembuatan Risalah.
 - b. Pengelolaan Transkrip.
 - c. Penyusunan Himpunan Risalah Rapat.
 - d. Penyusunan Anotasi Himpunan Risalah Rapat.
 - e. Penyusunan Catatan Rapat.
 - f. Penyusunan Laporan Singkat.
 - g. Pengelolaan Database Informasi Risalah.
 - h. Pengantar Pembuatan Risalah.
 - i. Pembuatan Transkrip.
 - j. Pengelolaan Transkrip.
 - k. Pengantar Penyusunan Himpunan Risalah.
 - l. Pengantar Penyusunan Catatan Rapat.
 - m. Pengantar Penyusunan Laporan Singkat.



- n. Pengantar Pengelolaan Database Informasi Risalah.
 - o. Konsep Dasar dan Siklus APBN.
 - p. Dasar-Dasar Keuangan Negara.
 - q. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - r. Metodologi Penelitian dalam Survei Ekonomi.
 - s. Modul Trigger.
 - t. Modul Mind Map.
 - u. Modul Slide Master.
 - v. Modul Tipe Umum Infografis dan Tema Presentasi
18. Pembayaran Honor Narasumber/ Moderator Kegiatan FGD Bidang.
19. Benchmarking dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui program perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan program pengembangan kompetensi teknis tenaga medis di BPSDM dan Bapelkes Provinsi Sumatera Selatan
20. Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan perencanaan Diklat dan pengembangan lainnya berupa pembahasan penyusunan modul tipe umum infografis, mind map, trigger, dan slide master.
21. Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan perencanaan Diklat dan pengembangan lainnya
22. Paket Meeting dalam Rangka Penyusunan Pedoman Pelatihan Fungsioal Analisis APBN Ahli Pertama.
23. Kegiatan Berdinas dari Rumah (Work from Home) dan Berdinas dari Kantor (Work From Office) selama masa Pandemi COVID-19

3.1.3 Bidang Pelaksanaan Diklat;

1. Pembelian sarana prasarana pelatihan virtual (oven listrik untuk perlengkapan jamuan ruang diklat, headphone PC untuk pelatihan virtual, HT mobile, paket data untuk host dan co-host pelatihan virtual, speaker active portable untuk pelatihan outdoor dan voice recorder untuk dokumentasi hasil rapat-rapat persiapan pelatihan) Dokumen Pelatihan Teknis (8 dokumen);





2. Jamuan Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan pelatihan statistika dan pelatihan perekaman;
3. Honor Tim Pengelolaan Pelatihan PKP;
4. Honor Tim Pembekalan Materi Ujian Dinas;
5. Honor Tim penjamin mutu bid. Evaluasi diklat;
6. Perjalanan Dinas dalam Rangka Survey Lokasi Pelatihan, Pendampingan Pelatihan;
7. Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional/ PKN Tingkat II;
8. Honor Tenaga Penceramah/Pengajar/Pendamping pelatihan PKP;
9. Perjalanan Dinas Koordinator Host, Co-Host, dan Pengelolaan Jaringan Pelatihan PKP secara daring di wisma DPR RI Kopo, Bogor-JABAR;
10. Perjalanan Dinas Peserta Pelatihan: PKN Tingkat II Angkatan I di LAN-Jakarta, PKN Tingkat II Angkatan II di BPSDM Kemendagri-Jakarta, PKN Tingkat II Angkatan X di LAN-Jakarta, PKN Tingkat I Angkatan XLV di LAN-Jakarta, PKN Tingkat II Angkatan IV di LAN-Jakarta;
11. Tunjangan biaya hidup dan operasional peserta beasiswa program S3 bulan Sept., Okt. Nov. dan Des. 2020 an. Suhartono, Cs. Pembayaran uang buku dan referensi prog. S3 an. Handrini A. dan biaya pendidikan Prog. Pascasarjana semester Ganjil th. 2020/2021 Dokumen Pelatihan Calon Pejabat Fungsional PUU (1 dokumen);
12. Pelatihan kepemimpinan dalam pengelolaan anggaran Setjen DPR RI, pelatihan purnakarya, pelatihan public speaking, pelatihan character building and teamwork Pusdiklat, Inspektorat satu dan Biro Umum Setjen DPR RI;
13. Paket meeting pelatihan kepemimpinan dalam pengelolaan anggaran Setjen DPR RI, perjalanan dinas peserta pelatihan kepemimpinan dalam pengelolaan anggaran Setjen DPR RI;
14. Biaya TOEFL Test di LP-IA Jakarta an. Pesta Evaria S. SE., M.Si, pelatihan android engineering an.M. Sasmito Adi Wibowo, Cs., pelatihan UI/UX design an. Daniel Tri W. Cs., pelatihan pengelolaan



- kelas virtual an. Endah Setianingsih, S.Sos. Cs. Pelatihan training custom access point controller migration an. Evlin Haditama Cs., diklat penjenjangan auditor utama di Pusdiklatwas BPKP an. Drs. Setyanta Nugraha, MM.;
15. Perjalanan dinas persiapan dan pendampingan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah dan perjalanan dinas peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat di wisma DPR RI griya sabha kopo, Bogor-Jabar., perjalanan dinas coordinator, host, co-host dan pengelola pengendalian jaringan kelas virtual ke wisma DPR RI griya sabha kopo, Bogor-Jabar., perjalanan dinas peserta dan pendampingan pelatihan character building and teamwork Biro Umum, perjalanan dinas peserta mengikuti simulasi dan ujian sertifikasi auditor berbasis computer di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor-Jabar an. Drs. Setyanta Nugraha, MM.;
 16. Honor penceramah/pengajar pelatihan perekaman, honor penceramah/pengajar ujian dinas dan kenaikan pangkat, honor penceramah/pengajar pelatihan statistika, honor narasumber sosialisasi pengembangan pedoman evaluasi diklat bid. Evaluasi diklat Setjen DPR RI;
 17. Honor narasumber sosialisasi pengembangan pedoman evaluasi diklat bid. Evaluasi diklat Setjen DPR RI;
 18. Honorarium PPNASN Pusdiklat sebanyak 4 orang;
 19. Perjalanan dinas peserta pelatihan pengelolaan kelas virtual an. Endah Setianingsih, S.Sos., peserta pelatihan training custom access point controller migration an. Evlin Haditama Cs., pendampingan IRTAMA di Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor-JABAR;
 20. Jamuan FGD ttg. Kebutuhan pelaksanaan diklat fungsional calon pejabat fungsional PUU, pengadaan sarpras pelatihan calon pejabat fungsional PUU.;
 21. Honor penceramah/pengajar diklat, penguji seminar individu, diklat fungsional calon pejabat fungsional perancang PUU, penceramah/pendamping kunjungan magang dan honor



- pengawas/pemandu ujian diklat fungsional calon pejabat fungsional perancang PUU Setjen. DPR RI;
22. Perjalanan Koordinator, host dan co-Host, pengelola operasional jaringan internet diklat fungsional calon pejabat fungsional perancang PUU di wisma DPR RI Kopo, Bogor-JABAR;
23. Kegiatan Berdinas dari Rumah (Work From Home) dan Berdinas dari Kantor (Work From Office) selama masa Pandemi COVID-19;

3.1.4 Bidang Evaluasi Diklat;

1. Rapat Koordinasi dan FGD sesuai Tugas dan Fungsi.
2. Honor Narasumber/ Moderator FGD.
3. Monitoring dan evaluasi Pelatihan Pengembangan Kapasitas Fasilitator di Pusdiklat Wisma Griya Sabha Kopo Tanggal 02-06 Maret 2020.
4. Perjalanan Dinas dalam Rangka Knowledge Sharing Pasca Latsar ke BPSDM Sumatera Utara Tanggal 16-19 Maret 2020.
5. Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan pengembangan pedoman evaluasi pelatihan di Wisma Griya Sabha Kopo
6. Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan SOP Monitoring dan Evaluasi Pelatihan di Wisma Griya Sabha Kopo
7. Kunjungan ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan BMKG Jakarta dalam rangka mendapatkan masukan/knowledge sharing terkait pengembangan progam pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan dasar CPNS tanggal 10 Februari.
8. Honor Tim Penyusunan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar CPNS Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2020
9. Honor Tim Penetapan Komite Penjamin Mutu Pada Pusdiklat Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2020
10. Kegiatan Berdinas dari Rumah (Work From Home) dan Berdinas dari Kantor (Work From Office) selama masa Pandemi COVID-19



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada Tahun 2020 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki 1 sasaran dalam 3 indikator, dan secara umum ketiga indikator tersebut dapat terpenuhi dan melebihi target yang telah ditentukan. Tantangan yang dihadapi berupa pandemi COVID-19 yang melanda dunia tidak menyebabkan banyak masalah dan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi secara keseluruhan. Beberapa perubahan dan inovasi dilakukan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi ditengah pandemi.

Indikator pertama yaitu 95% lulusan diklat dengan nilai minimal memuaskan, dari data yang telah disajikan pada Bab III dapat diambil kesimpulan jika indikator tersebut telah tercapai 100%. Dari target yang ditentukan yaitu 95%, telah dicapai lulusan diklat dengan nilai memuaskan sebesar 95,81%. Dengan kata lain maka capaian dari indikator kinerja yang pertama mencapai 100,85%.

Indikator kinerja yang kedua yaitu 90% persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat dengan penilaian minimal memuaskan, dari data yang telah disajikan dapat diambil kesimpulan jika indikator kinerja tersebut telah tercapai 111,11%, dengan perhitungan 100% peserta memberikan penilaian minimal memuaskan terhadap penyelenggaraan diklat.

4.2. Rekomendasi

Hasil capaian kinerja dari sasaran yang ditetapkan telah memenuhi target sesuai dengan perjanjian Kinerja tahun 2020, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna peningkatan kinerja di tahun mendatang, beberapa hal tersebut antara lain:

1. Menetapkan perencanaan kinerja yang berorientasi pada outcome;





2. Mengutamakan penggunaan metode pelatihan nonklasikal dibanding dengan metode pelatihan klasikal;
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai khususnya adalah Laboratorium Komputer;
4. Penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja untuk lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan tahun 2020 ini, pencapaian kinerja di tahun mendatang akan lebihbaik lagi.

